



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024

**DINSOSPERMASDES
KAB. BANYUMAS**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS,



ARIE TRIYANTO, S.Sos
Pembina Tk.I

19730331 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024-2026). Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.439.892.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.779.858.412,- atau mencapai 92,26%.

Capain kinerja untuk 2 tujuan di jabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran ke-1, Meningkatnya penanganan sosial capaian kinerja kategori Tercapai
2. Sasaran ke-2, Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa capaian kinerja kategori Tercapai.

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH.....	1
C. SUSUNAN ORGANISASI	2
D. SUMBER DAYA APARATUR.....	3
E. ISU – ISU STRATEGIS.....	4
BAB II.....	5
PERENCANAAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS	5
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	6
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	8
BAB III.....	9
AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	10
C. REALISASI ANGGARAN	30
D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN	31
E. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA.....	32
F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	33
BAB IV.....	34
PENUTUP	34
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	34
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas mengampuh 2 (dua) urusan yaitu urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Urusan sosial adalah layanan sosial yang terdiri dari jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial :
 - ✓ Layanan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS)
 - ✓ Layanan Pendampingan Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH)
 - ✓ Layanan Pendampingan Bagi Lanjut Usia (Lansia)
 - ✓ Layanan Pendampingan Penyandang Disabilitas.
 - ✓ Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana.

- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sesuai esensi permasalahan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

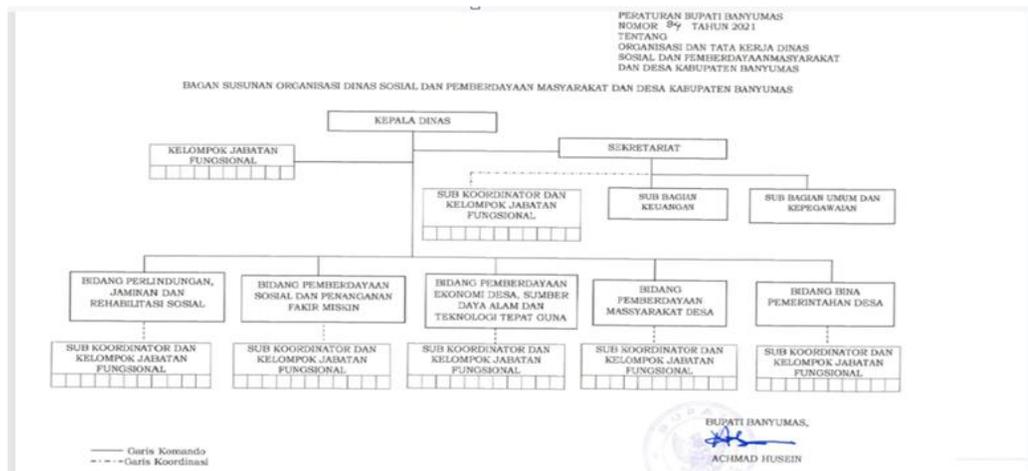
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas terdiri dari :
 Dengan Bagan sebagai berikut: (Sesuai Lampiran Perbup No.94 Tahun 2021)



D. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berdasarkan :

1. Golongan

Tabel.1.1
 PNS berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	-	-	-	-
Golongan II	1	2	3	6
Golongan III	13	16	29	63
Golongan IV	5	-	5	11
B. PPPK	3	6	9	20
Jumlah	42	24	46	100%

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

2. Jenjang Pendidikan

Tabel.1.2
 PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPOSIONAL (%)
SMA	7	3	10	22
D3	-	3	3	8
S1	10	18	28	60
S2	5	-	5	10
JUMLAH TOTAL	22	24	46	100%

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

E. ISU – ISU STRATEGIS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menanggung 2 (Dua) Urusan Wajib yang menjadi tanggung jawabnya yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam 2 (dua) urusan tersebut terdapat beberapa isu isu strategis yaitu :

1. Urusan Sosial
 - a. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga
 - b. Peningkatan PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - c. penanganan PPKS di rumah singgah
 - d. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa
 - b. Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - c. Fasilitasi pembinaan Perangkat desa
 - d. Fasilitasi Bantuan keuangan Desa (DD dan ADD)
 - e. Fasilitasi Pembinaan Bumdes
 - f. Fasilitasi kegiatan TMMD
 - g. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa
 - h. Indeks Desa Membangun
 - i. Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Epdeskel)
 - j. Kader Pembangunan Manusia
 - k. Pembangunan kawasan perdesaan
 - l. Profil Desa dan Kelurahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah: BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yaitu:

Tabel 2.1

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan ASN yang Profesional
		2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah
		5	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
		7	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana
		8	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi
3	Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM	9	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
		10	Meningkatkan kesempatan kerja
		11	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
		12	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		13	Meningkatkan derajat pendidikan

Tujuan		Sasaran	
		14	Meningkatkan Literasi Masyarakat
		15	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk
		16	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
		17	Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda
4	Memperkuat Ketahanan Pangan	18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri
		19	Meningkatkan keterjangkauan pangan
		20	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki 4 (empat) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran. Dan diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana matrik dibawah ini.

Tabel 2.2
Matrik keselarasan Pemerintah Kabupaten dengan indikator Tujuan pada Dinsospermades kabupaten Banyumas

No	Tujuan	Indikator Tujuan
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing		
Sasaran : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif		
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun
Tujuan : Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM		
Sasaran : Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin		
2	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Sumber : Dinsospermades Kabupaten Banyumas

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Keterkaitan Rencana strategis, Isu Strategis, Langkah Srategis dan Hambatan serta Solusi tertuang didalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Formulasi	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhannya	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di bagi jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di kali 100 persen (Absolut)	100 %
2	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	Jumlah PPKS yang terlindungi di bagi jumlah PPKS yang dilindungi di kali 100 persen (Absolut)	100 %
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	Jumlah PPKS terehabilitasi di bagi jumlah PPKS terehabilitasi dikali 100 persen (Absolut)	100 %
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	IKS + IKE+IKL dibagi 3 indeks	0,74
4	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Persentase desa yang meningkat statusnya	Potensi desa berkembang ke maju ditambah potensi desa dari maju ke mandiri di bagi jumlah desa di kali 100 %	10 %
		Persentase peningkatan status desa desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi jumlah desa berkembang (per awal tahun n) *100%	8 %

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas setelah perubahan sebesar Rp. 21.439.892.100.- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 20.592.798.800.- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 847.093.500,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

No.	PROGRAM	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.854.598.759,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 854.660.800,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 459.535.778,00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 5.696.691.460,00
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 227.500.000,00
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 76.105.000,00
7	Program Penataan Desa	Rp. 597.882.803,00
8	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 23.110.000,00
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.4.386.917.500,00
10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 262.890.000,00

Sumber : *Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2024.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Tujuan Dinsospermades tahun 2024

Tujuan / Indikator Kinerja		Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	KET.
Tujuan 1. Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	TERCAPAI
Tujuan 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan						
2.	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,74	0,7477	101	TERCAPAI
RATA – RATA CAPAIAN					100,5	

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata – rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinsospermades Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah sebesar 100,5 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2024 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100

Sumber: dinsospermasdes kab. Banyumas



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan

elayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Dasar Wajib yang harus dipenuhi dimana ada 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis terlantar dan kebencanaan. Dimana dari 5 indikator SPM harus di tangani dengan target 100% dan realisasi 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja
Tahun 2021,2022, 2023 dan tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TAHUN 2021				
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
TAHUN 2022				
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
TAHUN 2023				

Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
TAHUN 2024				
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100

Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2021 s.d. 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tujuan 1 (satu) dengan indikator kinerja meningkatnya kesejahteraan Pemerlu



Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian kinerja 100 % (tahun 2021 s.d 2024) karena semua PPKS baik yang terlindungi, ter rehabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.

- c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan targte akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2024
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100

dengan capaian kinerja 100 % (tahun 2021 s.d 2024) karena semua PPKS baik yang terlindungi, ter rehabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	NA	NA	NA	NA

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

- e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah

- 1) Sinergitas penanganan sosial dari beberapa unsur terkait (relawan, satpol PP, Dinkes, RSUD, Polres, Baznas)

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2024 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan

kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan *refocusing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Anggaran Induk 2024 dan Anggaran Perubahan 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp9.473.720.986,00	Rp.8.854.598.759,00	(Rp619.122.227,00)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 869.668.000,00	Rp. 854.660.800,00	(Rp15.007.200,00)
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 668.955.778,00	Rp. 459.535.778,00	(Rp209.420.000,00)
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.773.396.000,00	Rp 5.696.691.460,00	(Rp66.704.540,00)
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp277.586.000,00	Rp. 227.500.000,00	(Rp50.086.000,00)
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp25.000.000,00	Rp.76.105.000,00	Rp51.105.000,00

- g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.7.
Analisis program dan kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	97%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang aktif	98,26%	96,42%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	92,62%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	100%	88,76 %
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	100%	87,06 %
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase makam pahlawan yang dikelola	100%	80,05 %

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 6 (enam) program adalah 90,32% dengan rata rata realisasi keuangan untuk 6 (enam) program 90,32% ada efisiensi anggaran 9,68% dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** .bertujuan memberikan layanan ke bidang bidang agar berjalan tertib dan akuntabel. Dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kegiatan dan jumlah sub kegiatan 18 (delapan belas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran Rp. 8.854.598.759,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.116.831.957,00 dengan tingkat capaian sebesar 97%.
- **Program Pemberdayaan Sosial** bertujuan memperdayakan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti LK3, PSM, Karang Taruna, PKH,TKSK agar lebih aktif memberikan motivasi dan bantuan sosial kepada Masyarakat. terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.854.660.800,00 dengan realiasi sebesar Rp.759.807.733,00 dengan tingkat capaian sebesar 96,42%.

- **Program Rehabilitasi Sosial** bertujuan penangan terhadap PPKS (Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial) terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 459.535.778,00 dan realisasi Rp. 406.157.651,00 dengan tingkat capaian sebesar 92,62%.
- **Program perlindungan dan jaminan sosial** bertujuan untuk pendataan Bansos Masyarakat Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.773.396.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 4.489.527.805,00 dengan tingkat capaian sebesar 88,76%.
- **Program penanganan bencana** bertujuan untuk penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 227.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 197.101.125,00 dengan tingkat capaian sebesar 87,06%.
- **Program Taman Makam Pahlawan** bertujuan Memelihara dan Merawat Makam Pahlawan dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 1 (sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 76.105.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 60.918.250,00 dengan tingkat capaian sebesar 80,05%.

Tujuan 2: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan

- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.8.

Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,74	0,7477	101



Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun. terealisasi nilai 0,7477 dari target 0,74 atau tercapai 101%. Naiknya skor IDM karena ada penambahan nilai pada Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks

Ketahanan Ekologi Desa dari 301 desa.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja Tahun 2021,2022, 2023 dan tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TAHUN 2021				
Indek Desa Membangun	Indeks	0.681	0,703	103
TAHUN 2022				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,688	0,716	104
TAHUN 2023				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,694	0.732	105
TAHUN 2024				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,74	0,747	101



Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2021 s.d. 2024 dengan penjelasan sebagai berikut : IDM adalah alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa. Berdasarkan IDM, desa-desa di Indonesia dikategorikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Capaian kinerja pada tujuan 2 (dua) dari tahun 2021 s.d 2024 kategori tercapai rata rata 100 %. Indikator yang digunakan untuk mengukur IDM di antaranya adalah ketahanan sosial yang mencakup variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan atau ekologi.

- c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Desa Membangun	indeks	0,74	0,747	101	0,746	101

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
Indeks Desa Membangun	0,747	NA	0,7485	0,7902	0,7979

Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

- e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yg telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah

- Sosialisasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa baik pada masyarakat, Lembaga Masyarakat desa (LKD) tentang penting peranan masyarakat dalam pembangunan desa.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2024 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengotimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan *refocusing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Anggaran Induk 2024 dan Anggaran Perubahan 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp584.100.003,00	Rp. 597.882.803,00	Rp13.782.800,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp25.000.000,00	Rp. 23.110.000,00	(Rp1.890.000,00)
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp4.005.000.000,00	Rp.4.386.917.500,00	Rp381.917.500,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp201.000.000,00	Rp 262.890.000,00	Rp61.890.000,00

- g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.13
Analisis program dan kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa mandiri	100%	95,21 %
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	100%	90,44 %
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Administrasi Baik	100%	99,48 %
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	94,07 %

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 10 (sepuluh) program adalah 99,8 % dengan rata rata realisasi keuangan untuk 10 (sepuluh) program 92,11 % ada

efisiensi anggaran 7,69 % dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- **Program penataan desa** bertujuan membangun Masyarakat desa agar sarpras desa lebih baik dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp597.882.803,00 dan realisasi sebesar Rp. 569.262.063,00 dengan tingkat capaian sebesar 95,21%.
- **Program Peningkatan Kerjasama Desa** bertujuan memfasilitasi antar desa untuk membentuk kerjasama baik di sektor wisata atau perdagangan dengan kegiatan 1 (satu) dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.110.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 20.901.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 90,44%.
- **Program administrasi pemerintahan desa** bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa agar berjalan baik dan akuntabel. Dengan 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.386.917.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.046.877.608,00 dengan tingkat capaian sebesar 99,48%.
- **Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat** bertujuan fasilitasi dan memberikan edukasi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat desa baik perorangan atau Lembaga. Dengan jumlah 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp262.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 247.293.040,00 dengan tingkat capaian sebesar 94,07%.

2. Sasaran 1. Meningkatnya penanganan sosial

- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2024 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	100	100



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Dasar Wajib yang harus dipenuhi dimana ada 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis terlantar dan kebencanaan. Dimana dari 5 indikator SPM harus di tangani dengan target 100% dan realisasi 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja
Tahun 2021,2022, 2023 dan tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TAHUN 2021				
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhabiliasi	%	100	100	100
TAHUN 2022				
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhabiliasi	%	100	100	100
TAHUN 2023				
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhabiliasi	%	100	100	100
TAHUN 2024				
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhabiliasi	%	100	100	100

Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2021 s.d. 2024 dengan penjelasan sebagai berikut : Capaian kinerja 100 % (tahun 2021 s.d 2024) karena semua PPKS baik yang terlindungi, terhabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.



- c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan targte akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16.
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhabilitasi	%	100	100	100		

dengan capaian kinerja 100 % (tahun 2021 s.d 2024) karena semua PPKS baik yang terlindungi, terhabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.17.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	100	NA	NA	NA	NA
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	100	NA	NA	NA	NA

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kinerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kinerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

- e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yg telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah

Sinergitas penanganan sosial dari beberapa unsur terkait (relawan, satpol PP, Dinkes, RSUD, Polres, Baznas)

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2024 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengotimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan

kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocusing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Perbandingan Anggaran Induk 2024 dan Anggaran Perubahan 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp9.473.720.986,00	Rp.8.854.598.759,00	(Rp619.122.227,00)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 869.668.000,00	Rp. 854.660.800,00	(Rp15.007.200,00)
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 668.955.778,00	Rp. 459.535.778,00	(Rp209.420.000,00)
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.773.396.000,00	Rp 5.696.691.460,00	(Rp66.704.540,00)
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp277.586.000,00	Rp. 227.500.000,00	(Rp50.086.000,00)
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp25.000.000,00	Rp.76.105.000,00	Rp51.105.000,00

- g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.19
Analisis program dan kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	97%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang aktif	98,26%	96,42%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	92,62%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	100%	88,76 %
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	100%	87,06 %
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase makam pahlawan yang dikelola	100%	80,05 %

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 6 (enam) program adalah 90,32% dengan rata rata realisasi keuangan untuk 6 (enam) program 90,32 % ada efisiensi anggaran 9,68 % dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** .bertujuan memberikan layanan ke bidang bidang agar berjalan tertib dan akuntabel. Dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kegiatan dan jumlah sub kegiatan 18 (delapan belas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran Rp. 8.854.598.759,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.116.831.957,00 dengan tingkat capaian sebesar 97%.
- **Program Pemberdayaan Sosial** bertujuan memperdayakan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti LK3, PSM, Karang Taruna, PKH,TKSK agar lebih aktif memberikan motivasi dan bantuan sosial kepada Masyarakat. terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.854.660.800,00 dengan realiasi sebesar Rp.759.807.733,00 dengan tingkat capaian sebesar 96,42%.

- **Program Rehabilitasi Sosial** bertujuan penangan terhadap PPKS (Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial) terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 459.535.778,00 dan realisasi Rp. 406.157.651,00 dengan tingkat capaian sebesar 92,62%.
- **Program perlindungan dan jaminan sosial** bertujuan untuk pendataan Bansos Masyarakat Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.773.396.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 4.489.527.805,00 dengan tingkat capaian sebesar 88,76%.
- **Program penanganan bencana** bertujuan untuk penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 227.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 197.101.125,00 dengan tingkat capaian sebesar 87,06%.
- **Program Taman Makam Pahlawan** bertujuan Memelihara dan Merawat Makam Pahlawan dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 1 (sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 76.105.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 60.918.250,00 dengan tingkat capaian sebesar 80,05%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Peran Serta dalam pembangunan tahun 2024 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20.

Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	8 %	9,3	116
Persentase desa yang meningkat statusnya	%	10 %	9,4	94 %



Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun. terealisasi nilai 0,7477 dari target 0,74 atau tercapai 101%. Naiknya skor IDM karena ada penambahan nilai pada Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa dari 301 desa.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja
Tahun 2021,2022, 2023 dan tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TAHUN 2021				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,681	0,703	103
TAHUN 2022				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,688	0,716	104
TAHUN 2023				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,694	0,732	105
TAHUN 2024				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,74	0,747	101



Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2021 s.d. 2024 dengan penjelasan sebagai berikut : IDM adalah alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa.

Berdasarkan IDM, desa-desa di Indonesia dikategorikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Capaian kinerja pada tujuan 2 (dua) dari tahun 2021 s.d 2024

kategori tercapai rata rata 100 %. Indikator yang digunakan untuk mengukur IDM di antaranya adalah ketahanan sosial yang mencakup variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan atau ekologi.

- c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Desa Membangun	indeks	0,74	0,747	101	0,746	101

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.23.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
Indeks Desa Membangun	0,747	NA	0,7485	0,7902	0,7979

Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

- e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yg telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah

- Sosialisasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa baik pada masyarakat, Lembaga Masyarakat desa (LKD) tentang penting peranan masyarakat dalam pembangunan desa.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2024 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 5) Mengotimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024
- 6) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024
- 7) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 8) Melakukan refocusing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Anggaran Induk 2024 dan Anggaran Perubahan 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp584.100.003,00	Rp. 597.882.803,00	Rp13.782.800,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp25.000.000,00	Rp. 23.110.000,00	(Rp1.890.000,00)
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp4.005.000.000,00	Rp.4.386.917.500,00	Rp381.917.500,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp201.000.000,00	Rp 262.890.000,00	Rp61.890.000,00

- g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.25
Analisis program dan kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa mandiri	100%	95,21 %
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	100%	90,44 %
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Administrasi Baik	100%	99,48 %
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	94,07 %

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 10 (sepuluh) program adalah 99,8 % dengan rata rata realisasi keuangan untuk 10 (sepuluh) program 92,11 % ada efisiensi anggaran 7,69 % dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- **Program penataan desa** bertujuan membangun Masyarakat desa agar sarpras desa lebih baik dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp597.882.803,00 dan realisasi sebesar Rp. 569.262.063,00 dengan tingkat capaian sebesar 95,21%.
- **Program Peningkatan Kerjasama Desa** bertujuan memfasilitasi antar desa untuk membentuk kerjasama baik di sektor wisata atau perdagangan dengan kegiatan 1 (satu) dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.110.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 20.901.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 90,44%.
- **Program administrasi pemerintahan desa** bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa agar berjalan baik dan akuntabel. Dengan 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.386.917.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.046.877.608,00 dengan tingkat capaian sebesar 99,48%.
- **Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat** bertujuan fasilitasi dan memberikan edukasi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat desa baik perorangan atau Lembaga. Dengan jumlah 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp262.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 247.293.040,00 dengan tingkat capaian sebesar 94,07%.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasional	20.598.698.600,-	18.968.268.412	92
2.	Belanja Modal	841.193.500,-	811.590.000,-	96

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2024

No	TUJUAN / STRATEGIS	SASARAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	kesejahteraan Pelayanan	7.314.493.038,-	5.977.808.264,-	82 %
	Meningkatnya sosial	penanganan			
2.	Meningkatnya masyarakat dan desa dalam pembangunan	pemberdayaan	5.270.800.303,-	5.201.386.275,-	99 %
	Meningkatnya masyarakat pada pembangunan	peran serta			
	JUMLAH		12.585.293.341	11.179.194.539	

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			5.977.808.264,-	82 %
	Meningkatnya penanganan sosial	2	100		
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan				
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	2	11,96	5.201.386.275,-	99 %

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif untuk sasaran 1 (Satu) yaitu meningkatnya penanganan sosial dan Sasaran 2 (Dua) yaitu meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.29
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinj. Sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan sosial	2	100	82	18

2	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	2	105	99	1
	JUMLAH		205	181	19
	RATA-RATA		102,5	90	

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Analisis terhadap Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan sosial dengan rata-rata capaian kinerja 100 % karena terkait dengan pelayanan wajib dasar Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang serta dukungan dari instansi terkait dan mitra kerja sosial yang bergabung di jejaring sosial Dinsospermasdes sehingga terkait dengan anggaran ada efisiensi anggaran. Mitra Kerja Sosial misalnya BASNAZ, CSR Perbankan dan Komunitas Sosial yang ada di Kabupaten Banyumas.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan dengan rata rata capain kinerja 105 karena peningkatan status desa mulai dari berkembang menuju maju dan dari maju menuju ke mandiri di tahun 2024. Yang paling signifikan adalah status desa dari maju menuju mandiri sejumlah 34 desa di tahun 2024.

E. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyuma Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 214 paket realisasi nilai kontrak sebesar Rp 1.261.621.616,- untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing dan pengadaan langsung.

F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas tahun 2024 mendapat penghargaan Berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapat nilai 98,11 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi). Berikut kami sampaikan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.30

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.00	31.85	23.27	20.66	96.79

Sumber: *Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas*

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Dinsospermasdes Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100
	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	100	100	100
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ter rehabilitasi	100	100	100
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0,74	0,7477	101
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusnya	10	9,4	94
		Persentase peningkatan status desa desa mandiri	8	9,3	116

Berdasarkan capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

Indikator Kinerja Tujuan Dinsospermasdes ada 2 (dua) dengan rata-rata capaian 102 % predikat sangat tinggi

Tindaklanjut kedepan terkait pencapaian indikator kinerja tersebut diatas diharapkan sebagai berikut :

1. Urusan Sosial harus di tingkatkan koordinasi terkait perlindungan PPKS

(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) untuk program penyaluran bantuan sosial dari Pusat Kemensos terkait *Updating Data* DTKS untuk Kabupaten Banyumas. Dan penanganan PPKS dalam memberikan fasilitasi dan rehabilitasi serta pendampingan lebih baik lagi sesuai SOP yang ditetapkan.

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk program-program baik anggaran dari APBD dan Pusat harus mengakomodir pembangunan desa agar lebih mandiri dan maju.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menanggung 2 (Dua) Urusan Wajib yang Menjadi Tanggung jawabnya yaitu urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam 2 (dua) urusan tersebut terdapat beberapa isu isu strategis yaitu :

1. Urusan Sosial
 - ✓ Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga
 - ✓ Peningkatan PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - ✓ penanganan PPKS di rumah singgah
 - ✓ penanganan korban bencana alam dan bencana sosial
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - ✓ Fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa
 - ✓ Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - ✓ Fasilitasi pembinaan Perangkat desa
 - ✓ Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa (DD dan ADD)
 - ✓ Fasilitasi Pembinaan Bumdes
 - ✓ Fasilitasi kegiatan TMMD
 - ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa
 - ✓ indeks desa membangun
 - ✓ evaluasi perkembangan desa dan kelurahan (epdeskel)
 - ✓ kader pembangunan manusia
 - ✓ Pembangunan kawasan perdesaan
 - ✓ Profil Desa dan Kelurahan

Menyikapi isu isu diatas Dinsospermasdes Mengambil Langkah Langkah sebagai Berikut :

- Meningkatkan sinergitas dengan Stakeholder (Perangkat Daerah, Lembaga, Tenaga Ahli, Institusi, Relawan dan Swasta) terkait baik itu urusan sosial dan urusan pemberdayaan Masyarakat Desa

- Mengoptimalkan Sumberdaya (SDM, Sapras dan Anggaran) yang ada dalam urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF TRIYANTO, S. Sos.

NIP : 19730331 199203 1 002

Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HANUNG CAHYO SAPUTRO

Jabatan : Pj. BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua

Pj. BUPATI BANYUMAS



Pihak Pertama

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Banyumas

ARIF TRIYANTO, S. Sos.
NIP. 19730331 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Jalan Pemuda No. 24 Purwokerto- 53132
Telepon (0281) 636198, Fak. (0281) 633047

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target	Keterangan
Tujuan 1				
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Formulasi: Jumlah PPKS yang mendapat penanganan sosial (Indikator SPM) dibagi jumlah total PPKS*100% Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dokumen SPM Keterangan : -
Sasaran				
a.	Meningkatnya penanganan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	100%	Formulasi : jumlah PPKS yang terlindungi dibagi jumlah PPKS*100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dokumen SPM Keterangan : -
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	100%	Formulasi : Jumlah PPKS yang terehabilitasi dibagi jumlah PPKS*100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dokumen SPM Keterangan : -
Tujuan 2				
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0.74%	Formulasi : Index Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dokumen IDM Keterangan : index ekologi, index sosial budaya dan index ekonomi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target	Keterangan
	Sasaran			
a.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	Presentase peningkatan status desa mandiri	8%	Formulasi : Jumlah desa maju yang memenuhi potensi desa mandiri dibagi jumlah desa maju *100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dokumen IDM Keterangan : index ekologi, index sosial budaya dan index ekonomi
		Persentase desa yang meningkat statusnya	10%	Formulasi potensi desa berkembang ke maju di tambah potensi desa dari maju ke mandiri di bagi jumlah desa *100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dokumen IDM Keterangan : index ekologi, index sosial budaya dan index ekonomi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,473,720,986	APBD
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	869,668,000	APBD
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	668,955,778	APBD
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5,773,396,000	APBD
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	277,586,000	APBD
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25,000,000	APBD
7.	PROGRAM PENATAAN DESA	584,100,003	APBD
8.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000	APBD
9.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,005,000,000	APBD
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	201,000,000	APBD
	Jumlah	21,903,426,767	

Purwokerto, 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS



KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANYUMAS

Handwritten signature
ARIF TRIYANTO, S. Sos.
 NIP. 197302251982031002